

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian dalam arti seluas-luasnya merupakan sektor andalan (*basic sector*) bagi suatu bangsa dan negara besar seperti Indonesia. Sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan berbagai tingkat kemahiran (*skill levels*). Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, senantiasa dituntut untuk menyediakan pangan, sandang, obat-obatan, dan lapangan kerja bagi penduduknya. Selain itu, di dalam era globalisasi pasar, daya saing berbagai hasil kerja, termasuk hasil-hasil pertanian, harus kuat sehingga mampu bersaing dengan berbagai barang dari negara lain (Husodo, 2009:167). Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional abad ke-21, masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Namun, sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi maka kegiatan jasa-jasa dan bisnis yang berbasis pertanian juga akan semakin meningkat, yaitu kegiatan agribisnis akan menjadi salah satu kegiatan unggulan (*a leading sector*) pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang luas (Saragih, 2010:21).

Agribisnis merupakan suatu cara untuk melihat pertanian sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari empat subsistem yang terkait satu sama lain. Keempat subsistem tersebut adalah (1) subsistem agribisnis hulu, (2) subsistem agribisnis usahatani, (3) subsistem agribisnis hilir, dan (4) subsistem agribisnis penunjang. Pendekatan dengan sistem agribisnis akan memperbesar potensi pertanian, karena akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi produk-produk pertanian dan dapat mendorong tingkat efisiensi usaha yang semakin tinggi. Integrasi vertikal dalam agribisnis menyebabkan perolehan nilai tambah sektor pertanian akan berkait serta saling mempengaruhi dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa (Saragih, 2010:73-74).

Saat ini pertanian organik menjadi suatu bisnis baru dalam dunia pertanian Indonesia (Sutanto, 2002). Pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi

hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkendali. Pengelolaan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Prinsip kesehatan dalam pertanian organik adalah kegiatan pertanian harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi, dan manusia sebagai satu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan (Mayrowani, 2012:92).

Pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan dalam pengembangan pertanian organik seperti “Go Organic 2010”, namun perkembangan pertanian organik di Indonesia masih sangat lambat. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai kendala antara lain kendala pasar, minat konsumen dan pemahaman terhadap produk organik, proses sertifikasi yang dianggap berat oleh petani kecil, organisasi petani serta kemitraan petani dengan pengusaha. Namun minat bertani terhadap pertanian organik sudah tumbuh. Hal ini diharapkan akan berdampak positif terhadap pengembangan pertanian organik (Mayrowani, 2012:91).

Program “Go Organic 2010”, berisi berbagai kegiatan seperti pengembangan teknologi pertanian organik, membentuk kelompok tani organik, pengembangan perdesaan melalui pertanian organik, dan membangun strategi pemasaran pangan organik. Tetapi kenyataannya, pertanian organik belum berkembang dan masih sangat sedikit produk yang dihasilkan. Artinya, belum banyak petani yang menerapkan usaha pertanian secara organik. Pemerintah dalam hal ini termasuk masyarakat pertanian Indonesia diharapkan bertindak nyata dalam upaya mempopulerkan dan mengangkat citra produk pertanian organik Indonesia untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang tangguh (Mayrowani, 2012:98).

Program dan kegiatan pusat yang dilaksanakan di daerah antara lain pengadaan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik), APPO (Alat pengolahan Pupuk Organik), RP3O (Rumah Pengolahan dan Penyimpanan Pupuk Organik), pengadaan pupuk organik serta program dan kegiatan lainnya. Pemerintah Sumatera Barat juga mendirikan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). Lembaga ini menghimpun tenaga-tenaga ahli dan inspektur handal untuk mengawal seluruh

proses penanaman pangan organik sehingga dapat disertifikasi sesuai dengan regulasi yang ada (Daniel, Niidalina, dan Hardiyanto, 2014:37). Data terakhir yang didapat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatra Barat tahun 2016 yang sudah disertifikasi oleh LSO Sumatra Barat adalah 127,22 ha yang tersebar di tujuh kabupaten/kota yaitu Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Solok, Padang Panjang, dan Pesisir Selatan (Lampiran 1).

Di Sumatera Barat, apabila ditelusuri lebih dalam sebenarnya usahatani organik sudah menyebar hampir ke semua daerah sentra produksi padi. Hanya saja promosi dalam upaya pengembangan ini belum begitu intensif sehingga seolah-olah usahatani padi organik belum eksis. Kemampuan dan kemauan petani sudah cukup memadai, tetapi peningkatan kemampuan sejalan dengan perkembangan iptek disadari masih sangat kurang. Proses pengembangan SDM diakui berjalan sedikit lambat begitu juga dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan. Semua ini sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam penyediaan dana pembangunan (Daniel, Niidalina, dan Hardiyanto, 2014:38). Kurangnya dukungan institusi terkait dan masih adanya silang pendapat antar pakar dengan pengambil kebijakan, sehingga hal ini menyebabkan motivasi dan komitmen petani menjadi lemah dan ragu-ragu (Daniel, Niidalina, dan Hardiyanto, 2014:40).

Kita tidak akan mampu mengembangkan agribisnis modern kalau kita hanya mengembangkan usahatani (budidaya) saja. Prinsip pokok dalam pembangunan sistem agribisnis adalah mengembangkan keseluruhan subsistem yang tercakup dalam agribisnis secara simultan dan harmonis. Secara simultan artinya subsistem agribisnis hulu, subsistem on-farm, subsistem hilir, dan subsistem jasa penunjang harus dikembangkan sekaligus. Sedangkan secara harmonis artinya perkembangan keempat subsistem tersebut haruslah berkembang secara berimbang (Krisnamurthi, 2010:117).

Dalam pengembangan agribisnis padi organik di Sumatra Barat masih banyaknya masalah dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan pengembangan agribisnis padi organik. Menurut David (2009:19) strategi merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan

sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu, strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya untuk lima tahun ke depan, dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional serta perlu mempertimbangkan, baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi perusahaan. Manajemen strategis berusaha mengorganisasikan informasi kualitatif dan kuantitatif sedemikian rupa, sehingga memungkinkan diambilnya keputusan yang efektif dalam kondisi ketidakpastian yang melingkupinya.

B. Rumusan Masalah

Padang Panjang merupakan kota di Sumatera Barat yang pernah dijuluki “Kota Organik” oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 23 Juni 2009. Hal ini dikarenakan keseriusan pemerintah Kota Padang Panjang dengan berbagai program yang mendukung kegiatan pertanian organik.

Peranan pemerintah untuk mewujudkan pertanian organik sudah dimulai sejak tahun 2005 dengan pelaksanaan program SL-PHT disetiap kelompok tani (56 kelompok tani). Dalam pelaksanaan SL-PHT petani diberikan pengetahuan tentang pembuatan pestisida nabati dan pengenalan musuh alami. Pada tahun 2006 sampai tahun 2008 SL-PHT telah berkembang ke arah bercocok tanam dengan melaksanakan PTS. Pada awal tahun 2008 pemerintah juga telah mengalokasikan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti saprodi untuk pembuatan demplot PTS organik, bantuan alat-alat pembuatan pestisida nabati, peralatan-peralatan untuk membuat kompos, serta didukung oleh program pemerintah provinsi tentang kompensasi tidak membakar jerami (Paraja, 2012:43).

Pemerintah Kota Padang Panjang semenjak tahun 2008 telah mempersiapkan Kota Padang Panjang menjadi “Kota Organik” melalui beberapa program secara kontiniu yang mendukung terlaksananya pertanian organik ditingkat petani. Sehingga pada tanggal 23 Juni 2009 dicanangkan Kota Padang Panjang sebagai “Kota Organik” (Paraja, 2012:47). Gubernur Sumatera Barat kemudian menjuluki Padang Panjang sebagai “Kota Organik” dengan luas pertanian organik pada tahun 2009 tercatat 69 ha, dan pada tahun 2010 tercatat seluas 101 ha. Hal ini mengalami peningkatan luas lahan seluas 32 ha. Komoditi

ini sebagian dipasarkan di Kota Padang Panjang dan sebagian bahkan dipasarkan ke luar Kota Padang Panjang (Paraja, 2012:43). Namun ketika itu luas lahan organik di Padang Panjang belum disertifikasi organik oleh LSO Sumatera Barat, akan tetapi masih mengantongi surat keterangan pelaksanaan organik.

Dinas Pertanian Kota Padang Panjang pertanian organik di Kota Padang Panjang melalui program-program dengan membuat kebijakan, yaitu: (1) mengurangi pemakaian pupuk kimia yang dibuatkan SK Walikota Padang Panjang setiap tahunnya yang dimulai dari tahun 2009 sampai 2011, (2) membuat program pendukung untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik dengan mendirikan pabrik pupuk organik 1 unit, rumah kompos 1 unit, APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik) dan 2 unit UPO (Unit Pengolahan Organik), (3) pengadaan ternak sapi perah dan sapi potong setiap tahunnya, (4) melakukan kerjasama dengan SKPD lainnya untuk pemasaran hasil produksi organik (RSUD Kota Padang Panjang) dan tempat pemasaran organik 1 unit (outlet GOPO Shamaarat), (5) melarang membakar jerami bagi petani melalui kegiatan reklamasi lahan dan diberi kompensasi serta insentif tidak membakar jerami sebanyak Rp 200.000,00/ha, (6) berkomitmen memberikan insentif terhadap hasil produksi organik sebanyak Rp 250,00/kg (7) memperbaiki saluran irigasi dan melengkapi bangunan irigasi dengan membuat kolam penyaringan dari zat kimia (kolam eceng gondok pada pintu air masuk ke lahan sawah) dan (8) menyiapkan benih bermutu (Paraja, 2012:48). Pemberian insentif akan diberikan sampai tahun 2013, sesuai dengan rencana strategi Dinas Pertanian Kota Padang Panjang (Paraja, 2012:57).

Pada tahun 2014 berdasarkan berita yang dilansir Skalanews (2014), untuk meningkatkan perekonomian daerah setempat, pemerintah Kota Padang Panjang memproyeksikan beras organik menjadi produk unggulan pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Panjang, Ir. Candra yang menjabat di kala itu mengatakan bahwa beras organik merupakan salah satu produk yang dapat meningkatkan hasil pertanian di kota itu. Hasil pertanian masyarakat bisa meningkat dari yang biasanya sehingga akan berorientasi kepada peningkatan perekonomian. Harga beras organik lebih tinggi daripada beras biasa yakni Rp 18.000/kg sedangkan yang nonorganik hanya Rp 12.000/kg. Menurut keterangan

dari petani pada survei pendahuluan, petani lebih konsisten dalam menanam padi dibandingkan hortikultura maupun palawija lainnya.

Menjadi Kota Organik tidak serta merta menjadikan perkembangan pertanian organik di Padang Panjang berjalan dengan pesat. Berdasarkan data luas lahan pertanian organik yang telah disertifikasi oleh LSO Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Barat sampai keadaan Agustus 2016 tercatat Padang Panjang sebagai salah satu kota pengembangan padi organik dengan luas lahan terkecil di Sumatera Barat yaitu 8,20 hektar (Lampiran 1). Lembuti II merupakan satu-satunya kelompok tani yang sertifikasinya masih berlaku pada tahun 2017. Kelompok tani dan petani lainnya yang pernah disertifikasi yaitu Solok Batuang Organik dan Rosemery Organik sertifikasinya sudah tidak berlaku lagi tahun 2017 dengan masa berlaku berakhir pada tahun 2015 lalu (Lampiran 2).

Perkembangan pertanian organik di Kota Padang Panjang mengalami penurunan. Terbukti dengan berkurangnya jumlah kelompok tani yang membudidayakan pertanian organik (Lampiran 3). Saat ini hanya terdapat lima kelompok tani yang membudidayakan pertanian organik dengan komoditi padi dan sayuran. Kelompok tani tersebut yaitu Lembuti II, Lembuti I, Serumpun Makmur Organik, Rosemery Organik, dan Solok Batuang Organik (Lampiran 4). Adapun luas lahan organik saat ini adalah sekitar 27,585 ha. Berdasarkan keterangan dari beberapa petani organik, GOPO Shamaarat yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani budidaya organik di Kota Padang Panjang sekarang sudah tidak aktif lagi. Beberapa kelompok tani yang awalnya menerapkan pertanian organik kinipun beranjak kembali ke konvensional.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Pertanian Kota Padang Panjang, terdapat beberapa permasalahan dalam pertanian organik yaitu status kepemilikan lahan, proses sertifikasi yang rumit, kurangnya pemahaman petani, serta dihapuskannya insentif. Lahan-lahan organik tersebut penerapannya tidak secara terus-menerus menggunakan prinsip organik. Jika lahan tersebut disewakan atau digilir pengolahannya, maka nasib lahan tersebut apakah organik maupun konvensional itu tergantung kepada petani yang mengolahnya. Untuk lahan konvensional yang dikonversikan menjadi lahan organik itu membutuhkan waktu transisi selama 2 tahun. Rata-rata petani

berpendidikan hanya sampai tingkat SMP, sehingga petani sulit dalam menalarakan penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh. Proses sertifikasi organik yang rumit dan panjang juga menghambat langkah petani, serta masalah finansial untuk mendatangi lembaga-lembaga terkait.

Memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ketersediaan teknologi yang ada di Kota Padang Panjang yang sangat menunjang dalam pembangunan pertanian, maka Dinas Pertanian Kota Padang Panjang menetapkan visi yaitu *“Mewujudkan masyarakat tani yang amanah, aman, sejahtera melalui agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan”*. Berwawasan lingkungan artinya budidaya pertanian yang menerapkan kaidah pelestarian lingkungan. Salah satu indikator dalam mencapai visi berwawasan lingkungan adalah meningkatnya produksi dan populasi pertanian organik (Dinas Pertanian Kota Padang Panjang, 2014). Dengan adanya indikator tersebut, tentunya Dinas Pertanian Kota Padang Panjang membutuhkan strategi yang tepat dalam mencapai visi tersebut. Oleh sebab itu perlu dirumuskan strategi yang tepat dalam pengembangan pertanian organik di Kota Padang Panjang. Pengembangan pertanian organik seharusnya tidak hanya di sisi usahatani saja tapi agribisnis dengan subsistem yang saling terkait dan tergantung satu sama lain. Tak hanya dari petaninya saja tapi juga lembaga pendukung lainnya. Potensi pengembangan agribisnis juga harus didukung oleh komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan kegiatan pertanian serta kegiatan-kegiatan lain yang terkait dalam suatu sistem agribisnis.

Berdasarkan kondisi di atas, Kota Padang Panjang memiliki beberapa permasalahan internal dan eksternal yang dapat menghambat pengembangan agribisnis beras organik. Oleh sebab itu diperlukan strategi yang tepat dalam pengembangan agribisnis beras organik di Kota Padang Panjang. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana kondisi sistem agribisnis beras organik di Kota Padang Panjang?
- 2) Apa strategi yang tepat dalam pengembangan agribisnis beras organik di Kota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah yang ada yaitu :

- 1) Mendeskripsikan sistem agribisnis beras organik di Kota Padang Panjang.
- 2) Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta merumuskan strategi yang tepat dalam pengembangan agribisnis beras organik di Kota Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

Strategi yang dirumuskan direkomendasikan kepada pengambil kebijakan yang ada yaitu Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagi Dinas Pertanian Kota Padang Panjang sebagai pedoman dalam perencanaan pengembangan agribisnis beras organik di Kota Padang Panjang.
- 2) Penelitian ini juga merupakan sarana di mana penulis dapat menerapkan teori dan ilmu penulis dapatkan di dunia akademik.
- 3) Di samping itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

